

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang lebih baik yang dilakukan dengan terencana dan sistematis. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara fisik, mental, dan spiritual. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan juga dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara. Pembangunan sumber daya manusia mencakup peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Todaro, 1999).

Setelah 1960-an, banyak lahir pemikiran tentang upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia. Banyaknya minat para ilmuwan waktu itu berkaitan erat bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi pembangunan. Bukan hanya secara ekonomis, tetapi secara politispun pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu strategi untuk mengatasi persoalan pembangunan yang dipersiapkan lebih *acceptable*, dari pada strategi pengembangan sumber-sumber produksi lainnya, seperti pengadaan modal fisik serta adaptasi teknologi canggih (Elfindri, 2001).

Dewasa ini, dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*) yang disepakati oleh kepala

negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam KTT 2000. MDGs merupakan komitmen masyarakat internasional khususnya negara yang sedang berkembang terhadap visi pembangunan. Deklarasi Milenium menghasilkan kesepakatan berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Lahirnya deklarasi milenium tersebut merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur.

Sejak tahun 1990, *United Nation Development Program* yang merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan suatu indeks untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk menyusun IPM adalah tingkat

harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan per kapita riil. Semakin tinggi IPM, semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusianya (Arsyad, 2004).

Pembangunan manusia mengandung 4 unsur yaitu : produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustanbility*), dan pemberdayaan (*empowerment*). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita (Maryani, 2011).

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang diantaranya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, dan kesehatan. Investasi modal manusia ini mencakup pengembangan sumber daya manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia (Mankiw, 2007).

Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya pemerataan distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik akan membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat

produktifitas tenaga kerja. Distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Selain itu, rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Ginting, 2008).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih cukup banyak, pemerintah Indonesia telah bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Bahkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan jangka menengah (RPJMN) ditargetkan lebih cepat daripada target MDGs itu sendiri (Elbas, 2013).

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat *Gross Domestic Bruto* saja, tetapi juga dapat dilihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat diterjemahkan kedalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi yang sejahtera. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah.

Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia tersebut.

Bila di tinjau lebih spesifik, untuk Provinsi Sumatera Barat capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia 2012 adalah sebesar 74,70 persen. Di kawasan Sumatera, capaian ini masih di bawah provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2002 pernah menempatkan Sumatera Barat berada di peringkat ke 8 tingkat nasional dengan IPM 67,50 namun kemudian terjadi penurunan dari tahun 2004 hingga tahun 2012 ke peringkat 9 di tingkat nasional (BPS, 2012).

Dengan dukungan program-program pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015, seharusnya pembangunan manusia meningkat secara signifikan dan laju perubahan IPM meningkat cepat di Sumatera Barat, tetapi IPM Sumatera Barat malah mengalami penurunan peringkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti akan pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan *dependency ratio* sehingga mendorong dilakukannya penelitian yang berjudul : **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran di Sumatra Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan suatu

bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia.

Dengan dukungan program-program pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015, seharusnya pembangunan manusia meningkat secara signifikan. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan IPM Sumatera Barat tidak mengalami kenaikan signifikan dan malah turun peringkat yaitu dari peringkat 8 pada tahun 2002 turun ke peringkat 9 di tahun 2004 hingga tahun 2012 pada tingkat nasional (BPS, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *trend* perkembangan IPM di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan rasio ketergantungan penduduk terhadap IPM di Sumatera Barat ?
3. Apa kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah untuk meningkatkan IPM Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perkembangan IPM di Sumatera Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Sumatera Barat.
3. Menyarankan kebijakan untuk meningkatkan IPM di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pembangunan manusia.
2. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar selama penyusunan hasil penelitian ini terarah, maka perlu adanya pembatasan-pembatasan diantaranya :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan variabel terikat, serta pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, *gini ratio*, dan *dependency ratio* merupakan variabel bebas.
2. Lokasi objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat yang meliputi 19 Kabupaten/Kota untuk menggambarkan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
3. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
4. Untuk melihat hasil estimasi dari penelitian ini digunakan analisis data panel dengan total 57 observasi dari data sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang judul penelitian, selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pemilihan daerah penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode analisis data, metode pengumpulan data dan definisi operasional variabel penelitian,.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum (deskripsi objek penelitian) yaitu indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, indeks gini, dan kondisi kependudukan di Sumatera Barat.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan mengenai hasil analisis dari objek

penelitian, dan implikasi kebijakan yang disarankan kepada pihak pengambil kebijakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan saran-saran mendukung yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan tema dan hasil penelitian.